



Judul	: Mundur atau Copot Segera Wamenkum-HAM
Tanggal	: Kamis, 23 November 2023
Surat Kabar	: Media Indonesia
Halaman	: 3

Mundur atau Copot Segera Wamenkum-HAM

WAKIL Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy dinilai bisa memengaruhi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menanganinya kasusnya jika dia terus menjabat. Karena itu, Eddy yang berstatus tersangka didesak segera mengundurkan diri dari jabatannya.

"(Mengundurkan diri) ini untuk memotong psikohierarki dalam penanganan perkara sebab jabatan yang melekat pasti akan memengaruhi penyidik. Ada kuasa yang dijadikan posisi tawar," kata pakar hukum dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro, kemarin.

Menurutnya, penanganan kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi senilai Rp7 miliar yang menjerat Eddy bisa tidak berjalan objektif

jika yang bersangkutan terus menjabat. Sebab, kata Herdiansyah, posisi dia berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia.

Desakan Eddy mundur juga penting untuk memfokuskan diri atas proses hukum yang terjadi. Pejabat yang bertugas di bidang hukum tidak boleh berkeliling Indonesia dengan status sebagai tersangka. "Ini agar pejabat yang bersangkutan lebih fokus menghadapi perkara, sekaligus agar tidak berdampak terhadap kinerja atau jalannya pemerintahan."

Eddy diminta tidak malu mengundurkan diri. Dia bisa mencontoh pejabat yang lepas jabatan setelah berstatus tersangka, yakni mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. "Mentalitas pejabat kita masih terlalu feodal, yang

enggan berbesar hati meletakkan jabatan saat menghadapi perkara hukum," ucap Herdiansyah.

Jika Eddy menolak mundur, imbauh dia, Presiden Jokowi harus bersikap tegas mencopotnya. Jokowi semestinya paham dengan minimnya rasa malu pejabat saat berurusan dengan hukum. "Jokowi pasti sangat paham dengan kultur ini. Maka, kalau yang bersangkutan tidak mau meletakkan jabatannya, Jokowi lah yang mencopot jabatan itu."

Eddy diumumkan sebagai tersangka oleh KPK pada 9 November lalu, tetapi hingga kini belum juga dipanggil lembaga antirasuah itu. Eddy yang masih menjabat sebagai Wamenkum dan HAM tetap bekerja seperti biasa, termasuk ikut hadir dalam rapat kerja dengan

Komisi III DPR di Senayan, Senin (21/11). Kehadirannya sempat dipersoalkan anggota Komisi III Benny K Harman.

Menkum dan HAM Yasonna Laoly meminta publik menghargai asas tak praduga tak bersalah terkait dengan posisi wakilnya itu. "Silakan saja, kita menghormati proses-proses hukum, di saat yang sama kita juga menghargai asas praduga tak bersalah," tukas Yasonna.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan pihaknya berhati-hati mengusut kasus Eddy. Rencana untuk memeriksa pun tak akan dilakukan secara gegabah. "Kita, tentunya aparat penegak hukum, harus berhati-hati dalam menyikapi masalah hukum itu, tentunya memeriksa dengan baik, cermat," kata Johanis, dua hari lalu. (Can/Sru/X-4)